

ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN *E-GOVERNMENT* DI KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Andika Firman
NPP. 31.0109

Asdaf Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan
Email: 31.0109@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Ardieansyah S.STP, M.Soc Sc

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): This research is considered necessary and worthwhile for several reasons. First, based on a literature review, no research has yet examined the readiness for e-government implementation. Second, there is a lack of infrastructure such as server rooms and command centers. Third, there is a shortage of human resources in the field of information technology. Fourth, the budget for managing the SPBE (Electronic-Based Government System) is still insufficient. Fifth, the SPBE index is rated poorly and significantly lags behind other cities and regencies in West Sumatra. **Objective:** The aim of this research is to analyze the readiness for e-government implementation in Solok Selatan Regency. **Method:** This research uses a qualitative method with a descriptive qualitative approach. Data collection techniques include semi-structured and unstructured interviews, observation, and documentation, with purposive sampling employed. The researcher uses an interactive analysis model and conclusion drawing for data analysis. **Results/Findings:** The findings show that while the telecommunications and computer infrastructure at Diskominfo is adequate, there are still network and infrastructure issues, such as the lack of server rooms and a command center. The level of connectivity and the use of information technology by the government for service, empowerment, and development functions are running well. However, the readiness of IT human resources is still suboptimal, and the budget availability remains insufficient. The researcher suggests clear and detailed policies in governance, infrastructure, and e-government implementation. Human resources should be adequate and matched to the skills and needs. The budget capacity for SPBE implementation should be increased to optimize execution. Supporting infrastructure must be complete and adequate, and the community should have appropriate digital literacy knowledge. **Conclusion:** The researcher suggests clear and detailed policies in governance, infrastructure, and e-government implementation. Human resources should be adequate and matched to the skills and needs. The budget capacity for SPBE implementation should be increased to optimize execution. Supporting infrastructure must be complete and adequate, and the community should have appropriate digital literacy knowledge.

Keywords: Analysis, E-government, SPBE Index

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : alasan riset ini layak dan perlu dilakukan karena yang pertama, berdasarkan hasil kajian literatur belum ada riset yang mengkaji terkait kesiapan penerapan *e-government*. Kedua, kurangnya infrastruktur seperti ruang server dan *command center*. Ketiga kurangnya sumber daya manusia dalam bidang informasi teknologi. Keempat anggaran yang tergolong masih kurang untuk pengelolaan SPBE. Dan yang kelima, indeks SPBE yang memiliki predikat kurang dan masih jauh ketinggalan dari kota kabuapten di Sumatera Barat. **Tujuan** : Tujuan dari Penelitian ini adalah menganalisa kesiapan penerapan *e-goverment* yang berada dikabupaten Solok Selatan. **Metode** : penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara dengan wawancara semiterstruktur dan wawancara tidak terstruktur, observasi dan dokumentasi. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Peneliti menggunakan teknik analisis data dengan model analisis interaktif dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan** : Temuan penelitian menunjukkan bahwa dari Infrastruktur Telekomunikasi komputer di Diskominfo sudah cukup dan memadai dengan masih terdapat beberapa kendala jaringan dan infrastruktur yang belum adanya ruang server dan *command center*. Tingkat Konektivitas dan Penggunaan Teknologi Informasi oleh Pemerintah yang didasarkan pada fungsi pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan telah berjalan dengan baik. Kesiapan Sumber Daya Manusia khususnya bagian TI saat ini dinilai masih belum optimal. Ketersediaan Anggaran yang masih tergolong kurang. Pada penelitian ini peneliti memberikan saran agar adanya kebijakan yang jelas dan terperinci baik itu dalam tata kelola, infrastruktur dan pelaksanaan *e-government*. Sumber daya manusia yang harus dicukupkan dan disesuaikan dengan keahlian dan kebutuhan. Kapasitas anggaran penerapan SPBE yang harus ditingkatkan lagi untuk mengoptimalkan pelaksanaan. Infrastruktur pendukung yang harus lengkap dan memadai dan Masyarakat yang mempunyai pengetahuan literasi digital yang sesuai. **Kesimpulan** : Pada penelitian ini peneliti memberikan saran agar adanya kebijakan yang jelas dan terperinci baik itu dalam tata kelola, infrastruktur dan pelaksanaan *e-government* . Sumber daya manusia yang harus dicukupkan dan disesuaikan dengan keahlian dan kebutuhan. Kapasitas anggaran penerapan SPBE yang harus ditingkatkan lagi untuk mengoptimalkan pelaksanaan. Infrastruktur pendukung yang harus lengkap dan memadai dan Masyarakat yang mempunyai pengetahuan literasi digital yang sesuai.

Kata Kunci: Analisis, *E-government*, Indeks SPBE

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi masa kini merupakan sebuah desain kehidupan untuk kedepannya yang sangat maju yang disebut dengan “society 5.0” yang menjadi gambaran manusia untuk selalu hidup berdampingan dan hidup saling butuh dalam mewujudkan hidup kebahagiaan dan kesenangan untuk nantinya. Untuk mewujudkan society 5.0 harus banyak memiliki kesiapan yang sangat matang, baik dari segi pengetahuan, kesiapan sumber daya sara prasarana, kebijakan di pemerintahan, mindset hingga mental manusianya untuk menjadi lebih baik dalam pengembangan ini.

Tiga fungsi pemerintahan yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*) dengan tujuan yang berbeda. Pelayanan menghasilkan keadilan, pemberdayaan memacu kemandirian, dan pembangunan mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Sastrini & Dewi, 2024) Pengelolaan pemerintah dalam menyelenggarakan fungsinya harus bersifat akuntabel, transparan, terbuka, adil dan memiliki kemandirian sehingga mencapai tujuan dan kesejahteraan serta menjadi acuan terbentuknya *Good Governance* ((Wijaya, Pudjiarti, and Winarni, n.d.)2018:20). Untuk mewujudkan *good governance* tersebut teknologi hadir membantu memudahkan pelaksanaan fungsi pemerintahan sehingga muncul istilah *open governance* yaitu pemerintahan yang terbuka.

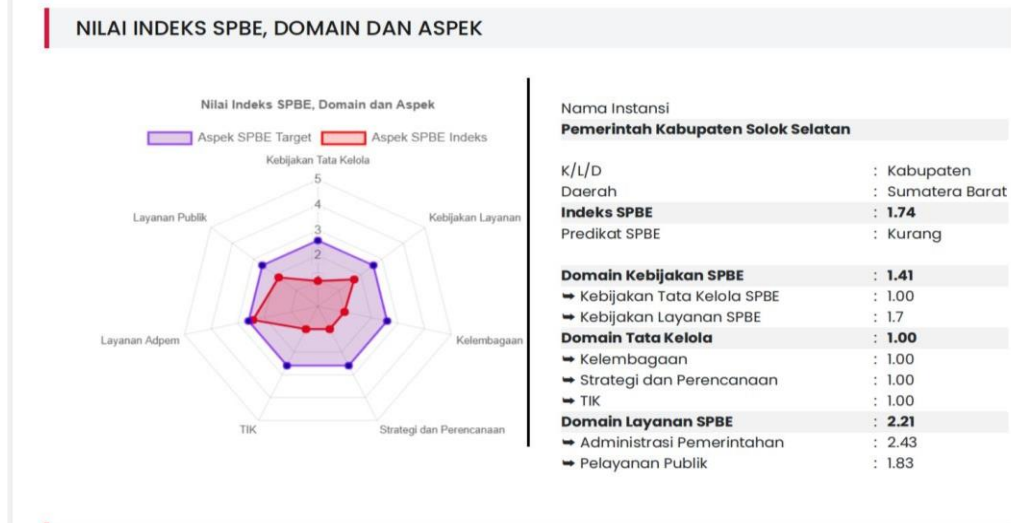
Wujud dari pemerintahan terbuka adalah lahirnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disebut SPBE atau dikenal juga dengan *e-Government* yang dijelaskan dalam (Rahmadi et al., 2021) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik¹. SPBE adalah suatu pemerintahan yang dijalankan dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan fungsi dan tugas untuk mewujudkan tujuan pemerintah. Dalam Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dijelaskan prinsip pelaksanaan SPBE adalah efektifitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas dan Keamanan Maka dapat dilihat bahwa dalam prinsip SPBE sangat berkesinambungan dengan prinsip *good governance*.

Penjelasan pembagian tugas pemerintahan konkuren dalam urusan pemerintahan daerah terdapat urusan wajib non pelayanan dasar yaitu bidang infomatika dan komunikasi yang ada. Maka pemerintahan daerah juga ikut mengembangkan SPBE di daerahnya. SPBE adalah pemerintahan diselenggarakan dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan fungsi dan tugas untuk mewujudkan tujuan pemerintah. Dalam Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dijelaskan prinsip pelaksanaan SPBE adalah efektifitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas dan Keamanan Maka dapat dilihat bahwa dalam prinsip SPBE sangat berkesinambungan dengan prinsip *good governance*.

Salah satu pemerintahan yang ikut melaksanakan SPBE adalah kabupaten Solok Selatan yang merupakan daerah otonomi yang dimekarkan dari kabupaten sebelumnya yaitu kabupaten Solok yang lahir sejak 7 januari 2004, dan dari saat itu Pemerintah kabupaten Solok Selatan mengikuti peraturan dari pusat tentang yaitu (Rahmadi et al., 2021) tentang penyelenggaraan SPBE. Selanjutnya, pada tahun 2019 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menindak lanjuti penerapan SPBE di tiap daerah dengan melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) SPBE. Namun, hasil dari monitoring dan evaluasi (Monev) SPBE dikabupaten Solok Selatan

¹ Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 2019. "Hasil Evaluasi Spbe Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Solok Selatan." *Portal SPBE Nasional*.

relatif masih rendah, dapat kita lihat melalui grafik berikut:



Sumber: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, (2023)

Gambar 1. 1 Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek Pemerintahan Daerah Solok Selatan Tahun 2019

Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa indeks SPBE di Kabupaten Solok Selatan hanya mendapat nilai 1.74 dengan predikat kurang. Dapat dilihat bahwa domain tata Kelola SPBE mendapat nilai terendah yaitu 1.00 pada masing-masing aspeknya. Hal ini menunjukkan penyelenggaraan SPBE yang masih belum maksimal di Kabupaten Solok Selatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Kusuma et al., 2021) struktur penilaian SPBE terdiri dari empat domain yang terdiri dari masing-masing aspeknya dan di dalam aspek terdapat indikator-indikatornya. Empat domain penilaian SPBE yaitu:

1. Kebijakan internal SPBE
2. Tata kelola SPBE
3. Manajemen SPBE
4. Layanan SPBE

Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa indeks SPBE Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2021 adalah 1,21 lebih rendah dari sebelumnya yaitu tahun 2019 yang mendapat nilai 1,74². Pemerintahan Daerah Solok Selatan menempati nomor urutan ke tujuh belas dari delapan belas Kabupaten dan Kab yang ada dalam hasil Monev SPBE se-Sumatera Barat tahun 2021. Bahkan Kabupaten Pasaman Barat yang diresmikan sebagai daerah otonom bersamaan dengan Kabupaten Solok Selatan bisa mendapatkan nilai 2,18 yaitu dua kali lebih besar dari nilai Kabupaten Solok Selatan. Maka pelaksana utama SPBE yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Solok Selatan harus memiliki strategi dan solusi yang tepat dalam melaksanakan tugas meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan SPBE di Kabupaten Solok Selatan agar nilai indeks SPBE di Solok Selatan dapat lebih baik lagi kedepannya.

² Solatan, Badan Pusat Statistik Solok. 2022. *Solok Selatan Dalam Angka 2022*. Solok Selatan.

Upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten solok selatan saat ini untuk menuju pemerintahan berbasis digital agar pelayanan yang dilayani kepada seluruh orang agar lebih cepat dan transparan yaitu mewujudkan bumi “*Sarantau Sasurambi*” dengan menjalin kerja sama dengan daerah kabupaten/Kab yang telah banyak mengeluarkan inovasi tentang spbe ini, salah satunya kabupaten Padang Pariaman. Kedua belah pihak berkomitmen untuk mendorong pelayanan publik yang lebih baik. Bappeda, BPKD, Disdukcapil, telah mempersiapkan segalanya termasuk anggaran yang harus disediakan agar Solok Selatan juga bisa meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini. Dengan tekad dilakukannya penandatanganan nota kerja sama ini, pihak organisasi perangkat daerah lainnya akan mengikuti langkah tersebut dengan menjalin kerja sama sesuai tupoksinya.

Salah satu aplikasi pendukung dalam peningkatan kinerja sistem pemerintahan berbasis elektronik ini yaitu aplikasi Sistem Informasi Dasa Wisma Langsung, Bermanfaat, Inovatif, dan Mandiri (*SIMSALABIM*) Solok Selatan. Program yang telah dilakukan sebelumnya oleh pemerintah kabupaten Solok Selatan yaitu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengadakan acara untuk memperkenalkan Master Plan Pengembangan Teknologi Informasi Kabupaten Solok Selatan. Acara ini berlangsung di Hotel Pesona Alam, Sangir, pada tanggal 16 Desember 2021. Andi Yuniantoro, yang merupakan CEO Inixindo Jogja, berperan sebagai pembicara utama dalam acara tersebut. Beliau menjelaskan bahwa *Master Plan* ini mencakup panduan untuk pengembangan teknologi informasi dalam berbagai aspek, seperti konsep *smart city*, Satu Data Indonesia, infrastruktur jaringan, kelembagaan SPBE, dan keamanan informasi. Tujuannya adalah untuk mendorong pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar lebih berfokus pada layanan digital. *Master Plan* ini telah disusun sesuai dengan visi, misi, dan sasaran strategis yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan, dengan tujuan untuk memajukan daerah tersebut. Asisten Pemerintahan dan Kesra, Fidel Efendi, yang mewakili Bupati Solok Selatan, menekankan pentingnya mengambil langkah-langkah konkret dalam mengembangkan teknologi informasi.

Untuk mendapatkan analisa yang baik dan tepat dalam permasalahan ini, maka penulis melakukan penelitian tentang “**Analisis kesiapan penerapan *e-government* di Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat**” dalam hal ini penelitian akan dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Solok Selatan. Sehingga dapat ditemukan strategi yang tepat dari hasil penelitian ini dan dimanfaatkan dengan baik untuk peningkatan nilai indeks SPBE di Kabupaten Solok Selatan kedepannya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Dari penelitian sebelumnya yang telah ditampilkan dengan berdasarkan pengamatan peneliti terhadap permasalahan pengembangan SPBE di Solok Selatan yaitu dalam pelaksanaan dan penerapannya belum ada kemajuan yang berdampak berarti, sehingga monitoring yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Revormasi Birokrasi (PANRB) pada tahun 2021 Kabupaten Solok Selatan hanya mendapatkan indeks SPBE dengan nilai 1,21 dalam predikat kurang (RI, 2021: 10)³. Olehkarena itu peneliti ingin menganalisis strategi pengembangan SPBE di

³ RI, Kemen PANRB. 2021. “Keputusan Menteri Nomor 1503 Tahun 2021 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada Kementerian, Lembaga Dan Pemerintah Daerah Tahun 2021.”

Kabupaten Solok Selatan dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu dengan melihat kekurangan, kelebihan, peluang dan ancaman dalam pengembangan SPBE di Solok Selatan. Agar kedepannya SPBE di Solok Selatan berjalan lebih baik dan juga diharapkan adanya peningkatan nilai indeks SPBE Solok Selatan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, **baik** dalam konteks analisis kesiapan penerapan e-government. Perancangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang berkelanjutan di Provinsi Banten (**Supriyanto et al., 2021**) Perancangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Banten pada penelitian ini difokuskan pada penyusunan peta rencana SPBE Provinsi Banten Tahun 2022-2026. Pembuatan Peta Rencana SPBE ini diawali dengan melihat gambaran kondisi SPBE Provinsi Banten pada saat ini yang kemudian dibandingkan dengan kondisi yang diinginkan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Dengan demikian Peta Rencana merupakan program atau kegiatan yang direncanakan untuk mengurangi gap antara keadaan SPBE Banten saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan. Implementasi Gap Analisis Dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Pada Kabupaten Bener Meriah (Dwitawati, 2022). Penelitian ini menyajikan tentang analisis gap penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kabupaten Bener Meriah tahun 2021. Analisis Gap disusun berdasarkan proses pengumpulan data sekunder berupa tingkat kematangan SPBE kabupaten Bener Meriah yang terdiri dari domain kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE. Evaluasi Faktor Kegagalan Sistem Informasi Pada Kesiapan Penerapan E-Government: Studi Literatur (et al., 2020). Analisis Kesiapan Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam Penerapan e-Government (Dionisia Mariani et al., 2020) Electronic Government adalah upaya penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Atas tuntutan perubahan paradigma pelayanan publik ini, Pemerintah Kabupaten Manggarai mulai menerapkan e-Government dalam memberikan pelayanan publik guna memberikan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan efisien. Analisis Kelayakan Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Publik Di Bidang Keagrariaan Di Kabupaten Pinrang (Surdin, 2016). penelitian ini menunjukkan bahwa kelayakan implementasi e- government pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang belum optimal, hal ini disebabkan dalam organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang belum didukung adanya peraturan pemerintah daerah tentang penerapan e- government secara rinci walaupun kesiapan Sumber Daya Manusia sudah mendukung serta kesiapan Infrastruktur telah memadai.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Dari penelitian sebelumnya yang telah ditampilkan dengan berdasarkan pengamatan peneliti terhadap permasalahan pengembangan SPBE di Solok Selatan yaitu dalam pelaksanaan dan penerapannya belum ada kemajuan yang berdampak berarti, sehingga monitoring yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Revormasi Birokrasi (PANRB) pada tahun 2021 Kabupaten Solok Selatan hanya mendapatkan indeks SPBE dengan nilai 1,21 dalam predikat kurang (RI, 2021: 10)⁴. Oleh karena itu peneliti ingin menganalisis strategi pengembangan SPBE di

⁴ RI, Kemen PANRB. 2021. "Keputusan Menteri Nomor 1503 Tahun 2021 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada Kementerian, Lembaga Dan Pemerintah Daerah Tahun 2021."

Kabupaten Solok Selatan dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu dengan melihat kekurangan, kelebihan, peluang dan ancaman dalam pengembangan SPBE di Solok Selatan. Agar kedepannya SPBE di Solok Selatan berjalan lebih baik dan juga diharapkan adanya peningkatan nilai indeks SPBE Solok Selatan.

1.5. Tujuan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kesiapan penerapan *e-goverment* yang berada di kabupaten Solok Selatan agar bisa menaikkan nilai indeks SPBE di Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

II. METODE

Suatu penelitian pada hakikatnya memiliki tujuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan tentang suatu hal yang dinyatakan benar melalui proses bertanya dan menjawab. Dalam penelitian ini penulis memakai metode penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti dalam kondisi objek alamiah. (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih memberi makna dari pada generalisasi (Ardieansyah et al., 2023).

Pengaruh dari penelitian kuantitatif terlihat melalui pemanfaatan teori sebagai instrumen analisis data dan penempatan teori sebagai landasan berpikir sejak awal perjalanan suatu penelitian. Pendekatan terhadap teori tersebut masih mengikuti pendekatan deduktif, yang merupakan ciri khas dari desain penelitian kuantitatif dengan paradigma positivisme. Hanya setelahnya, data akan dianalisis, dan desain penelitian akan bermetamorfosis menjadi pendekatan kualitatif yang bersifat induktif (Bungin, 2011)

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap delapan orang informan yang terdiri dari: 1.) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Solok Selatan; 2.) Kepala; 3.) Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Solok Selatan; 4.) Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Solok Selatan; dan 5.) Masyarakat berjumlah tiga orang. Adapun analisis pada penelitian ini menggunakan Menurut (Palazzolo, 2023) mengemukakan bahwa: “ *We make three other claims for the power of qualitative data. The strengths of qualitative data rest very centrally on the competence with which their analysis is carried out. We define analysis as consisting of three concurrent flows of activity: data reduction, data display, and conclusion drawing/verification*”

Dari kutipan di atas dijelaskan terdapat 3 (tiga) kekuatan data kualitatif. Kekuatan data bergantung pada kompetensi yang digunakan untuk melakukan analisis. Miles dan Huberman

mendefinisikan analisis terdiri dari 3 aliran aktivitas yang bersamaan yaitu reduksi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan analisis terhadap kesiapan penerapan *e-government* di Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat. Kesiapan suatu *e-government* dapat dilihat dari *leader* atau pemimpin dari pemerintahan dengan memperlihatkan *politic will* untuk menerapkan *egovernment*. Kesiapan pada penerapan suatu *e-government* adanya suatu “kebijakan” dari kalangan pemerintah dan *stakeholder*-nya untuk berbagi dan bertukar informasi dalam penyelenggaraan kegiatan sehari-hari. Dari 2 (dua) prasyarat kesiapan *e-government* tersebut yaitu pemimpin dan kebijakan. Ada 6 (enam) dimensi yang dikemukakan (Indrajit et al., 2005)⁵ dalam menentukan kesiapan penerapan *e-government*.

3.1 Infrastruktur Telekomunikasi

Infrastruktur telekomunikasi adalah serangkaian komponen fisik yang digunakan sebagai dasar dalam berbagai layanan komunikasi saat ini, seperti internet, telepon, serta layanan nirkabel lainnya. Dalam menunjang proses pengembangan *E-Government* tentunya memerlukan infrastruktur telekomunikasi yang memadai agar dalam pelaksanaannya bisa secara optimal.

3.1.1. Komputer

Di zaman modern yang serba digital ini komputer mempunyai peran yang penting dalam proses pengembangan *E-Government*, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik tentunya menggunakan komputer dalam melakukan pelayanan publik sehingga diperlukannya komputer yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas untuk mendukung proses pengembangan *E-Government* sehingga dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

3.1.2. Jaringan

Jaringan merupakan sebuah struktur penting karena merupakan sistem yang menghubungkan berbagai perangkat untuk melaksanakan tugasnya sehingga dalam proses pengembangan *e-government* bisa berjalan dengan optimal. Untuk mengetahui kondisi jaringan di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Solok Selatan,

3.1.3. Infrastruktur

Infrastruktur adalah sistem fisik yang menyediakan sarana dan prasana seperti jembatan, bangunan, jalan, dll. Infrastruktur memiliki fungsi penting dalam mencapai suatu tujuan. Di Diskominfo Kabupaten Solok Selatan Infrastruktur yang tersedia masih terbilang kurang hal ini dibuktikan dengan belum adanya ruang server dan command center pada Diskominfo Kabupaten Solok Selatan

3.2 Tingkat Konektivitas dan Penggunaan TI Oleh Pemerintah

Tingkat Konektivitas dan Penggunaan TI Oleh pemerintah merujuk pada seberapa baik pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam menggunakan infrastruktur

⁵ Indrajit, Richardus Eko. “Konsep dan Strategi Electronic Government.” *Electronic Government* 84 (2016): 1–166.

teknologi informasi untuk meningkatkan konektivitas, efisiensi, dan efektifitas dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat. Kabupaten Solok Selatan dalam rangka pengembangan teknologi dibidang pemerintahan telah mengadakan *Focus Grup Discussion* untuk merencanakan penyusunan masterplan pengembangan teknologi informasi di Kabupaten Solok Selatan yang di adakan diaula Bappeda Kabupaten Solok Selatan pada 7 Desember 2021 lalu, dan telah menghasilkan Laporan Akhir dari Masterplan Dukungan alokasi Sumber Daya Sumber pendanaan pemerintah daerah Solok Selatan meletakkan SPBE pada di Dinas Komunikasi Informatika yang merupakan urusan wajib non pelayanan dasar sehingga pelaksanaan alokasi sumber daya SPBE masih terbatas karena bukan termasuk dari fokus kerja pemerintahan daerah Kabupaten Solok Selatan. Namun, pemerintah Solok Selatan telah menjalin Kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi *icon+* untuk mengalokasikan jaringan telekomunikasi di titik *blankspot* di Kabupaten Solok Selatan. Nagari-nagari yang akan dikelola yaitu di antaranya Nagari Alam Pauh Duo, Lubuak Gadang Tenggara, Pakan Rabaa Timur, Dusun Tengah dan tiga Nagari di Lubuak Alang Aling.

3.3 Kesiapan Sumber Daya Manusia di Pemerintahan

Pada dimensi Kesiapan SDM di pemerintah ini terdapat 2 indikator yang akan dibahas oleh peneliti yaitu tingkat keahlian dan tingkat kompetensi karena sumber daya manusia merupakan faktor penting keberhasilan dalam mewujudkan Smart City di suatu daerah.

3.3.1 Tingkat Keahlian

Tingkat keahlian adalah SDM yang bisa untuk menerapkan, memahami dan mengerti tentang sebuah skill yang bisa digunakan untuk memberikan layanan publik yang berguna bagi masyarakat.

3.3.2 Tingkat Kompetensi

Tingkat Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh pegawai pemerintah dalam menggunakan dan mengelola teknologi informasi untuk tujuan pemerintahan. Menurut (Study & Grade, 2011) kompetensi adalah suatu kemampuan yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja dan dapat diterapkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan persyaratan kerja yang ditetapkan di tempat kerja.

3.4 Ketersediaan Anggaran

Anggaran merupakan faktor penting dari berjalannya sebuah program atau kegiatan untuk memenuhi tujuan dari suatu organisasi atau pemerintahan, Oleh karena itu peneliti akan membahas 3 indikator yang terdapat pada dimensi Ketersediaan Anggaran.

3.4.1 Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk menjaga suatu perangkat, sistem, atau infrastruktur bisa tetap berjalan dengan baik dan efektif. Tentu saja bahwa pemeliharaan perangkat, sistem, dan infrastruktur pemerintah harus selalu dijaga agar bisa berjalan dengan optimal untuk mendukung tujuan pemerintahan,

3.4.2. Pengembangan

Anggaran untuk pengembangan mencakup pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM bagian IT agar bisa menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan kedepannya.

3.4.3. Operasional

Anggaran Operasional adalah anggaran pengeluaran yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari organisasi. Pemerintahan pastinya tidak lepas dengan adanya anggaran operasional karena dengan anggaran kegiatan dan program pemerintahan bisa dilaksanakan.

3.5 Perangkat Hukum

Perangkat hukum adalah seperangkat kebijakan, regulasi, dan hukum yang mengatur tentang pengelolaan Teknologi Informasi di layanan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tentunya memiliki kebijakan dan regulasi tentang pengelolaan Teknologi Informasi di pemerintahannya dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Solok Selatan sebagai penanggung jawab pengelolaan Teknologi Informasi Di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

3.5.1 Undang-Undang

Proses pengembangan E-Government tentunya perlu dilandasi hukum, salah satunya undang-undang.

3.5.2. Peraturan Daerah

Sebuah kebijakan tentunya pasti harus mempunyai peraturan daerah untuk menjadi dasar pelaksanaan kebijakan atau program tersebut. Dinas komunikasi Informatika dan persandian Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan proses pengembangan E-Government didasari oleh Perda nomor 2 tahun 2023

3.5.3. Peraturan Bupati

Peraturan Bupati juga menjadi sebuah acuan dalam pelaksanaan program atau kebijakan sebuah daerah. Begitu juga dengan pelaksanaan E-government Di Kabupaten Solok Selatan yang memiliki dasar perbup Nomor 33 tahun 2021⁶.

3.6 Perubahan Paradigma

Perubahan paradigma tentu dibutuhkan karena zaman dimana teknologi selalu berkembang harus diikuti dengan paradigma modern agar tidak tergerus dengan zaman yang semakin maju seperti saat ini. Paradigma lama dalam pelayanan publik contohnya pelayanan yang lama, kurang responsif, dan kurangnya efisiensi waktu memerlukan perubahan paradigma modern seperti pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pelayanan, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

3.6.1. Cara berpikir

Cara berpikir tentunya harus mengikuti perkembangan saat ini agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, hal tersebut sudah diterapkan di Pemkab Solok Sealatn Khususnya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Solok Selatan

3.6..2. Cara Kerja

Cara kerja dengan paradigma lama tentunya tidak efektif dan efisien yang mengakibatkan waktu pelayanan yang lama, untuk meningkatkan efektifitas pelayanan dibutuhkan cara kerja yang modern dimana memanfaatkan teknologi informasi agar terciptanya pelayanan publik yang memiliki efisiensi tinggi dalam pelayanannya.

3.6..3. Bersikap

Cara bersikap melibatkan sikap yang fleksibel dalam artian menerima dan siap beradaptasi akan perubahan paradigma, sikap terbuka, dan proaktif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

⁶ Selatan, Solok, and Dalam Angka. 2021. “Kabupaten Kabupaten.”

Dengan menerapkan sikap-sikap tersebut seseorang bisa menghadapi perubahan paradigma dengan baik dan efektif.

3.6.4. Berperilaku

Di Zaman yang selalu mengalami perkembangan ini tentunya diperlukan sikap untuk berperilaku aktif terhadap perubahan, terbuka terhadap pemikiran baru, dan konsisten dengan nilai-nilai perubahan. Sikap-sikap tersebut dibutuhkan oleh pemerintah di zaman yang berkembang pesat ini agar efektifitas pelaksanaan tujuan pemerintahan bisa tercapai dengan optimal.

3.6.5. Kebiasaan Sehari-Sehari

Untuk mendukung paradigma baru tentunya diperlukan konsistensi dalam menerapkan tindakan-tindakan dalam adaptasi paradigma baru. Hal tersebut mempengaruhi kebiasaan sehari-hari sebuah organisasi untuk berubah dalam bertindak dari cara konvensional ke cara modern. Hal tersebut harus diterapkan pada pemerintahan agar cara pemerintah dalam melakukan pelayanan publik bisa memiliki efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini meneliti kesiapan implementasi e-government di Kabupaten Solok Selatan dengan menggunakan teori Indrajit (2005)⁷ sebagai kerangka acuan. Metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian ini mengungkapkan berbagai aspek kesiapan e-government di daerah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi informasi di Kabupaten Solok Selatan masih memerlukan banyak peningkatan. Meskipun ada upaya signifikan dari pemerintah daerah untuk membangun jaringan fiber optic dan meningkatkan kapasitas server, akses internet yang stabil dan cepat masih belum merata di seluruh wilayah. Dari data yang dikumpulkan, diketahui bahwa sekitar 60% kantor pemerintahan sudah terhubung dengan internet, namun hanya 40% yang memiliki kecepatan akses yang memadai. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, infrastruktur masih menjadi hambatan utama dalam penerapan e-government.

Sumber daya manusia juga menjadi aspek penting dalam kesiapan e-government. Penelitian ini menemukan bahwa kemampuan teknis pegawai pemerintahan dalam penggunaan teknologi informasi masih bervariasi. Meskipun ada pelatihan dan workshop yang diselenggarakan, penyebarannya belum merata dan belum mencakup teknologi terbaru yang dibutuhkan untuk implementasi e-government. Dari survei yang dilakukan, hanya 35% pegawai yang merasa sangat siap dan terampil dalam menggunakan sistem e-government, yang menandakan bahwa pelatihan yang ada belum cukup efektif dan belum mencapai semua pegawai yang membutuhkan. Regulasi dan kebijakan terkait e-government di Kabupaten Solok Selatan sudah mulai ada, namun implementasinya masih belum konsisten. Beberapa regulasi yang ada seringkali belum diimplementasikan secara penuh di tingkat operasional. Data empiris menunjukkan bahwa meskipun ada lima regulasi utama yang telah disahkan, hanya dua yang diterapkan dengan baik. Ini menunjukkan bahwa masih ada kebingungan dan kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan regulasi tersebut.

Pembiayaan untuk e-government juga masih terbatas. Meskipun ada anggaran yang dialokasikan, jumlahnya seringkali tidak mencukupi untuk mendukung semua kebutuhan teknologi dan pelatihan yang diperlukan. Dari laporan keuangan, hanya sekitar 10% dari total anggaran

⁷ Indrajit, Richardus Eko. "Konsep dan Strategi Electronic Government." *Electronic Government* 84 (2016): 1-166.

teknologi informasi yang digunakan untuk pengembangan e-government, yang menunjukkan bahwa banyak kebutuhan yang masih belum terpenuhi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Solok Selatan telah memulai langkah-langkah awal yang baik dalam mempersiapkan implementasi e-government, tetapi masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, regulasi, dan pembiayaan semuanya memerlukan peningkatan agar e-government dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Temuan ini sejalan dengan teori Indrajit (2005) yang menekankan pentingnya kesiapan di berbagai aspek untuk mencapai keberhasilan e-government. Penelitian ini memberikan panduan yang berharga bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih dalam upaya mereka menuju transformasi digital.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait Analisis Kesiapan Penerapan *E-government* di Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan teori Indrajit (2005) dapat disimpulkan bahwa : Dimensi Infrastruktur Telekomunikasi dengan indikator Komputer sudah memadai dan cukup dari segi spesifikasi dan jumlahnya dan indikator Jaringan masih terdapat beberapa masalah seperti belum terhubungnya jaringan komunikasi antar opd untuk sinkronisasi server dan indikator Infrastruktur juga belum tersedianya ruang server dan *command center* di Diskominfo.

Tingkat Konektivitas dan Penggunaan Teknologi Informasi oleh Pemerintah yang didasarkan pada fungsi pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan telah berjalan dengan baik yang ditandai dengan dimanfaatkannya aplikasi atau layanan sistem informasi untuk mendukung ketiga fungsi tersebut dan penerapan Masterplan dengan memberikan sosialisasi SPBE kepada pegawai opd dan masyarakat.

Kesiapan Sumber Daya Manusia khususnya bagian TI saat ini dinilai masih belum optimal, hal tersebut dikarenakan kurangnya SDM yang memiliki kapabilitas pada bagian teknologi informasi dengan dibuktikan adanya beberapa pegawai yang masih bersifat umum dan belum menguasai sepenuhnya teknologi informasi.

Ketersediaan Anggaran yang masih tergolong kurang tetapi untuk pemeliharaan tergolong cukup untuk mendukung pemeliharaan unit agar selalu bisa berjalan sesuai fungsinya dan untuk anggaran pengembangan SDM terutama di bidang IT belum optimal serta untuk operasional masih tergolong cukup untuk pelaksanaan masing-masing bidang dengan baik.

Perangkat Hukum yang menjadi landasan dalam pelaksanaan e-government adalah Perpres No. 95 Tahun 2018 mengenai SPBE kemudian diturunkan menjadi Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perubahan Paradigma yang terjadi di pemerintah Kota Ternate mulai dari cara berperilaku, bersikap, kebiasaan sehari-hari, dan cara kerjanya yang lebih efektif dan efisien karena sudah memanfaatkan teknologi informasi sehingga pelayanan yang diberikan bisa lebih optimal.

Keterbatasan Penelitian.

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).

Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, proses penelitian yang dilakukan masih belum sepenuhnya lengkap dan memerlukan pendalaman lebih lanjut. Namun demikian, pada temuan awal ini dapat memberikan inspirasi, saran, dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terkhusus Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Solok Selatan sebagai tata kelola penerapan *e-government*. Selain itu, peneliti berharap adanya penelitian yang lebih mendalam dan lebih lanjut terkait kesiapan penerapan *e-government* di Kabupaten Solok Selatan

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah memberikan kesempatan penulis mengembangkan keterampilan penulisan karya ilmiah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan yang telah memberikan kesempatan penulis melakukan penelitian untuk menganalisa kesiapan penerapan *e-government* di Kab. Solok Selatan, dan seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu sehingga penelitian ini selesai tepat waktu.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ardieansyah et al., 2023. (2023). *metodologi penelitian sosial*. CV BUDI UTAMA.
- Bungin, M. B. (2011). *Masy Kontem*. 1, 125–136.
- Dionisia Mariani, R., Walliam, D., & Laurensius Say, R. (2020). Analisis Kesiapan Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam Penerapan e-Government. *Jurnal Administrasi Dan Demokrasi*, 1, 48–56.
- Dwitawati, I. (2022). IMPLEMENTASI GAP ANALISIS DARI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PADA KABUPATEN BENER MERIAH. *JINTECH: Journal Of Information Technology*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.22373/jintech.v3i1.1552>
- Indrajit, R. E., Zainudin, A., & Rudianto, D. (2005). Electronic government in action. *Yogyakarta: Andi Yogyakarta*, 1–272. <https://www.academia.edu/download/50613264/Preinexus-TeknikSearchingEfektifDuniaPendidikan.pdf>
- Kusuma, A. A., Wasistiono, S., & Pitono, A. (2021). PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT. *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13(2), 145–158. <https://doi.org/10.54783/jv.v13i2.422>
- Palazzolo, D. J. (2023). Research Methods. *Experiencing Citizenship: Concepts and Models for Service-Learning in Political Science*, 109–118. <https://doi.org/10.4324/9781003444718-9>

- R Pamungkas, A., Edi Nugroho, L., & Sulisty, S. (2020). Evaluasi Faktor Kegagalan Sistem Informasi Pada Kesiapan Penerapan E-Government: Studi Literatur. *JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, 3(3), 143–152. <https://doi.org/10.33387/jiko.v3i3.2176>
- Rahmadi, A. N., Jibril, M., & Muhammad, A. (2021). Implementasi E-Government Kota Probolinggo (Studi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Implementation of E-Government in Probolinggo (Study of Presidential Regulation Number 95 of 2018 Concerning Elect. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(3), 1–11. <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/8002/6164>
- RI, Kemen PANRB. 2021. “Keputusan Menteri Nomor 1503 Tahun 2021 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada Kementerian, Lembaga Dan Pemerintah Daerah Tahun 2021.”
- Sastrini, L. K. A. M., & Dewi, N. M. W. (2024). Peranan Peraturan Kebijakan Dalam Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 214–223.
- Study, C., & Grade, S. (2011). *Faculty of Educational Sciences and Teachers ' Training*.
- Supriyanto, S., Ridwan, A., Tamam, R., Santoso, M. I., Satria, D., & Mutaqin, A. I. S. (2021). Perancangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang berkelanjutan di Provinsi Banten. *Journal Industrial Servicess*, 7(1), 171. <https://doi.org/10.36055/12952>
- Surdin, J. (2016). Analisis Kelayakan Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Publik Di Bidang Keagrariaan Di Kabupaten Pinrang. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 5(1), 178–191. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/view/1892/1057>
- Wijaya, Pudjiarti, and Winarni, 2018. (n.d.). *Good Governance*.